



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**( L K I P )**

**KECAMATAN TEGALREJO**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

## KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKIP) Kecamatan Tegalrejo Tahun 2018 dapat tersusun.

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tegalrejo dalam rangka melaksanakan Misi 1 Walikota Yogyakarta yaitu meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. Selain itu juga merupakan pengendalian dan motivator bagi setiap unit kerja di lingkungan Kecamatan Tegalrejo. Laporan ini memuat gambaran pencapaian sasaran strategis tahunan yang diukur berdasar indikator kinerja utama Kecamatan Tegalrejo yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Tegalrejo yang telah ditetapkan.

Selain data capaian indikator kinerja utama, dalam laporan ini juga menyajikan data capaian kinerja indikator kinerja program sebagai perwujudan secara lebih detail berfungsinya program yang telah dilaksanakan.

Semoga laporan ini dapat menjadi evaluasi dan motivator kerja bagi Kecamatan Tegalrejo untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 30 Januari 2019

Camat Tegalrejo

Drs. Raden Ryanto Tri Noegroho  
NIP.19620420 199303 1 004

## DAFTAR ISI

Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Bagan / Grafik	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum Kecamatan Tegalrejo .....	3
D. Isu Strategis Organisasi.....	7
E. Sistematika Penyajian .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	14
A. Perencanaan Strategis.....	14
B. Perjanjian Kinerja .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018.....	17
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya .....	25
3. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja utama dengan target jangka menengah dalam Renstra.....	27
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan .....	28
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	29
6. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.....	31
B. Realisasi Anggaran .....	32
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	34
A. Kesimpulan .....	34
B. Rencana tindak lanjut .....	34
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin .....	6
Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.....	6
Tabel I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin...	7
Tabel I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering .....	7
Tabel II.1 Perjanjian Kinerja .....	15
Tabel III.1 Indikator Kinerja Utama .....	16
Tabel III.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	16
Tabel III.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan .....	17
Tabel III.4 Perbandingan target dan realisasi indikator program .....	18
Tabel III.5 Data Prosentase Swadaya Masyarakat pada PMK .....	19
Tabel III.6 Realisasi Fisik Tahun 2018.....	19
Tabel III.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan tahun sebelumnya.....	26
Tabel III.8 Perbandingan Capaian dan Realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya .....	26
Tabel III.9 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama.	27
Tabel III.10 Perbandingan Capaian Indikator kinerja Program dengan Target Renstra .....	27
Tabel III.11 Analisis Efisiensi .....	29
Tabel III.12 Realisasi Anggaran .....	32

## DAFTAR BAGAN

Bagan I.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	5
--	---

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- ✓ PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018
- ✓ REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD BULAN DESEMBER 2018
- ✓ HASIL PENILAIAN EVALUASI DIRI DALAM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2018
- ✓ PENGELOLAAN SKM TAHUN 2018
- ✓ DOKUMEN FOTO SWADAYA MASYARAKAT KELURAHAN BENER

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2018 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Kecamatan Tegalrejo termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2018.

Laporan kinerja juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tegalrejo adalah :

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Tegalrejo secara jelas, transparan dan akuntabel.
2. Memberikan wujud pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun anggaran 2018 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tegalrejo adalah:

1. Menyajikan media informasi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Tegalrejo tahun 2018.
2. Menyajikan bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Tegalrejo pada tahun 2018 sebagai acuan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan Tegalrejo dalam penerapan azas transparansi, sistematis dan *accountable*.



## **C. Gambaran Umum Kecamatan Tegalrejo**

### **1. Kedudukan, tugas pokok dan Fungsi**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan.

Pembentukan organisasi Kecamatan di Wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut dan juga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Pasal 3 (tiga) , kecamatan berkedudukan :

- a. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
- b. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 (empat) di sebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing. Sedangkan fungsi kecamatan tertera pada Pasal 5 (lima) sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) di atas, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Kecamatan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta juga melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Peraturan Walikota tersebut sebagai penyempurnaan dari peraturan walikota yang sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya.

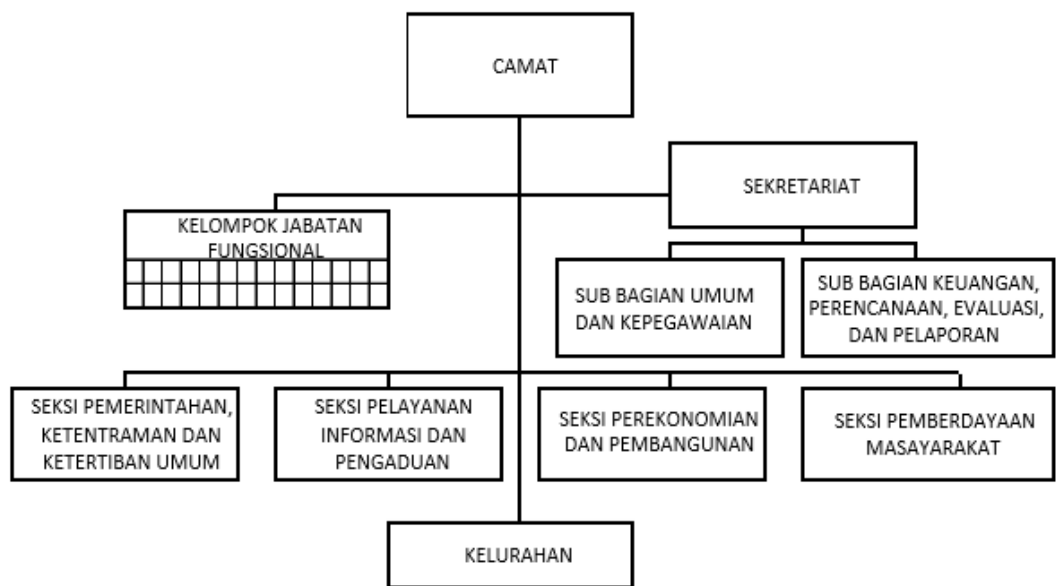
## **2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah**

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Kecamatan Tegalrejo adalah kecamatan tipe A dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut pada Pasal 2 (1) terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tegalrejo sebagai kecamatan tipe A mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

Bagan I.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah



### 3. Sumber Daya Manusia Kecamatan Tegalrejo

Sumber Daya Manusia / Kepegawaian

PNS : 42 orang

Naban/PTT : 1 orang

Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1  
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan, golongan dan jenis kelamin

NO	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Camat	1	-	-	-	1	1
2.	Sekcam	-	1	-	1	-	1
3.	Kasi Kecamatan	2	2	-	3	1	4
4.	Kasubag	1	1	-	2	-	2
5.	Jabfung umum kec.	1	1	2	-	-	2
6.	Naban Kecamatan	-	1	-	-	-	1
7.	Lurah	1	3	-	3	1	4
8.	Seklur	2	2	-	4	-	4
9.	Kasi Kelurahan	4	8	-	11	1	12
10.	Naban kel.	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	12	19	2	24	4	31

Selanjutnya kualitas sumber daya manusia terutama para pejabat struktural diukur dari pendidikan penjenjangan yang diikuti adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel I.2  
Jumlah pegawai berdasarkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	1	-
2	Diklatpim IV	9	6	3
3	ADUM	7	1	6
4	SEPADA	1	0	1
5	Struktural yang Belum diklat penjenjangan	6	2	4

Selain dari pendidikan penjenjangan yang telah diikuti maka secara umum tingkat pendidikan dari para pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel I.3  
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	S2	5	1	4
2	S1	13	5	8
3	D III	6	1	5
4	SLTA	15	10	5
5	SLTP	3	3	0
6.	SD	0	0	0
	Jumlah	39	20	22

Jumlah Pegawai Kecamatan Tegalgrejo berdasarkan Eselonering adalah sebagai berikut :

Tabel I.4  
Jumlah pegawai berdasarkan eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	-	1
3	IV A	8	4	4
4	IV B	14	4	10

#### D. Isu Strategis Organisasi

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

##### a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Profesional;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012. PATEN itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Tegalrejo pada Tahun 2015 yaitu Kelurahan Kricak, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Bener. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia pada saat itu. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun

untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Selain itu untuk memperoleh masukan dalam hal pelayanan publik, Kecamatan Tegalrejo telah membentuk Forum Komunikasi Publik (FKP) yang bertujuan untuk membahas tema tertentu dalam pelayanan kepada masyarakat serta memperoleh masukan untuk upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selain itu juga telah dikeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kecamatan Tegalrejo selaku salah satu penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2016 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi Kantor Kelurahan Tegalrejo, Tahun 2015 Kantor Kecamatan Tegalrejo dan Tahun 2017 Kantor Kelurahan Karangwaru dan Kelurahan Bener. Pemeliharaan gedung kantor yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat meliputi perbaikan ruang laktasi, pendopo kecamatan dan pengecatan Kelurahan Tegalrejo dan pembuatan Nomor Antrian pelayanan dengan mesin antrean serta running teks.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah pembangunan gedung kantor Kelurahan Kricak sampai tahun 2018 ini belum terwujud untuk pembangunan kantor Kelurahan

#### **b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang



secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kricak, pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karangwaru, pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tegalrejo dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bener bersifat non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Tegalrejo yang terdiri dari empat kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

#### **c. Pembangunan Kewilayahan**

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

#### **d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan**

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh

kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Tegalrejo. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

#### **e. Keterbukaan Informasi Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Sebagian informasi publik tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

#### **E. Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tegalrejo tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, gambaran singkat tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, isu-isu strategis serta sistematika penyusunan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan Uraian ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018 sesuai dengan dokumen perencanaan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pada perjanjian kinerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun 2018, perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, realisasi capaian indikator kinerja program. Selain itu juga menyajikan analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan dan alternatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

## **BAB IV PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Tegalrejo tahun 2018 dan upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

## **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS 2017 - 2022**

##### **1. Visi dan Misi SKPD**

###### **a. Visi**

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**.

###### **b. Misi**

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui **misi kesatu**, yaitu **Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat**.

Dengan misi Kecamatan Tegalrejo yaitu **mewujudkan pengembangan pelayanan masyarakat berdasarkan sendi-sendi pelayanan prima**.

##### **2. Tujuan dan Sasaran**

###### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Tegalrejo memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo”**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 349, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 354.

## b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek ( tahunan, semesteran, bulanan ). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Tegalrejo menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat”**. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 349, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 354.

Sedangkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam kerangka perencanaan Strategis di Instansi Kecamatan Tegalrejo adalah dengan menetapkan program kegiatan, meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
5. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

## B. PERJANJIAN KINERJA

Secara ringkas perencanaan kinerja Kecamatan Tegalrejo pada tahun 2018 baik program kegiatan maupun besarnya alokasi anggaran dapat dilihat pada penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai berikut :

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Anggaran
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo	350	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Rp 2.997.724.326



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

Tabel III.1  
Indikator Kinerja Utama  
Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo

Misi 1:	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target						Sumber data
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo	349	350	351	352	353	354	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kelurahan

Pengukuran Kinerja dilakukan dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel VII-C Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel III.2  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

## 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018 Kecamatan Tegalrejo dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III.3  
Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja sasaran / tujuan

Tujuan	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo		
Sasaran	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat		
Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	% Capaian
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo	350	359	102,57

Melihat tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2018 adalah 102,57.% dengan nilai peringkat Kinerja sangat tinggi. Persentase dapat dikatakan bahwa Kecamatan Tegalrejo berkinerja optimal karena baik kualitas capaian kinerja maupun tingkat perkembangan kelurahan masih dalam kategori yang sama yaitu cepat berkembang berdasar pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagai catatan prestasi atas capaian kinerja tersebut, pada tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Peringkat IV Tingkat Kota untuk penilaian Adipura Kecamatan
2. Nominasi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik antar Kecamatan se DIY
3. Peringkat V Tingkat Kota Penataan PK5
4. Peringkat V Tingkat DIY Hatinya PKK
5. Juara Umum Tingkat Kota Lomba Taman dan Kontes Sayur dan Buah
6. Peringkat I Tingkat DIY Asuhan Toga dan Akkupresure
7. Peringkat III Tingkat DIY kecamatan terbaik dalam pelaksanaan Program KB
8. Peringkat II Tingkat II Volley Putri dalam Rangka Dandim Cup II
9. Peringkat II Tingkat Kota Kampung Hijau Proklim
10. Peringkat V Tingkat Kota Toga



Selanjutnya capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel perbandingan target dan realisasi indikator program sebagai berikut:

**Tabel III.4**  
Perbandingan target dan realisasi indikator program

No	Program/kegiatan	Indikator	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Persentase
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	97,11%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	99,97%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capain kinerja dan keuangan	100%	100%	100%
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	78,3	80,7	103,06%
		Tingkat Swadaya Masyarakat	31,75%	22,37%	70,45%

Rumus penghitungan nilai indikator untuk program eksternal yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat menggunakan ketentuan perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Formulanya adalah Jumlah NRR \* nilai tertimbang dari 9 unsur \* 25 (terlampir)
- b. Tingkat Swadaya Masyarakat dihitung dari Prosentase jumlah swadaya masyarakat pada dana PMK. Formulanya adalah jumlah dana PMK pada LPMK se Kecamatan Tegalrejo di bagi jumlah LPMK Kecamatan Tegalrejo yang mendapatkan dana PMK dikalikan 100.

Data penunjang tingkat swadaya masyarakat sebagaimana yang dilaporkan dari LPMK se Kecamatan Tegalrejo dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.5**  
Data prosentase swadaya masyarakat pada dana PMK Tahun 2018

NO	LPMK	2017			2018		
		Jumlah dana PMK (Rp)	Jumlah Swadaya (Rp)	%	Jumlah dana PMK (Rp)	Jumlah Swadaya (Rp)	%
1.	LPMK Kricak	113.982000	34.194.600	30	113.982.000	34.194.600	30
2.	LPMK Karangwaru	107.932.000	34.427.000	31,90	107.932.000	34.427.000	31,90
3.	LPMK Tegalrejo	107.327.000	45.654.800	42,54	107.327.000	20.707.501	19,29
4.	LPMK Bener	85.910.000	17.500.000	20,37	85.591.000	1.607.000	2,07
	Jumlah rata-rata prosentase dana swadaya terhadap dana PMK			31,74			22,37

Berdasarkan capaian kinerja program pada tabel III.4 dan III.5 serta grafik prosentase jumlah swadaya di atas, maka dapat diketahui sebagai berikut :

1. Prosentase capaian kinerja terhadap indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2018 103,6% dengan nilai peringkat kinerja sangat baik.
2. Capaian kinerja indikator swadaya masyarakat tahun 2018 adalah 70,45% dengan nilai peringkat sedang.

Rincian Capaian fisik dari indikator/output program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.6**  
Realisasi Fisik Tahun 2018

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	TARGET	REALISASI	PROSENTASE (%)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk:			
	a. Koordinasi	140 kali	140 kali	100
	b. Pegawai	47 orang	47 orang	100
	c. Tamu	560 org	560 org	100
Penyediaan jasa peralatan, dan perlengkapan kantor	Uang Piket Non PNS	12 Bulan	12 Bulan	100
	Alat Tulis Kantor yang tersedia	34 Jenis	34 Jenis	100
	Komponen Instalasi Listrik	3 paket	3 Paket	100
	Materei 6000	200 buah	200 buah	100
	Materei 3000	3000 buah	3000 buah	100
	Belanja peralatan kebersihan	12 jenis	12 jenis	100
	Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	3 jenis	3 jnis	100
	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	25 tabung	25 tabung	100
	Belanja Bahan Komputer/Printer	12 jenis	12 jenis	100
	Belanja Alat perlengkapan kantor/Runah tangga/kerja	17 jenis	17 jenis	100

	Belanja Telpon	12 bulan	12 bulan	100
	Belanja Air	12 bulan	12 bulan	100
	Belanja Listrik	12 bulan	12 bulan	100
	Belanja Surat Kabar/Majalah	14 jenis	14 jenis	100
	Belanja dekorasi, dokumentasi, publikasi, Pembuatan Film			100
	Belanja Retribusi	12 bulan	12 bulan	100
	STNK roda 4 yang terbayar	1 unit	1 unit	100
	STNK roda 3 yang terbayar	2 unit	2 unit	100
	STNK roda 2 yang terbayar	12 unit	12 unit	100
	Belanja Cetak dan penggandaan	2 jenis	2 jenis	100
	Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor	2 jenis	2 jenis	100
	Jasa pemeliharaan	7 jenis	7 jenis	100
	Belanja Modal	8 jenis	8 jenis	100
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa tenaga bantuan	1 orang	1 orang	100
<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor	Jasa pemeliharaan Rumah Dinas	1 jenis	1 jenis	100
	Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor	3 jenis	3 jenis	100
	Pemeliharaan taman			100
Penyediaan dan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			
	a. Roda 4	1 unit	1 unit	100
	b. Roda 3	2 unit	2 unit	100
	c. Roda 2	12 unit	12 unit	100
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase peningkatan laporan capain kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100
Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun	6 dok	6 dok.	100
	2. Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 laporan	6 laporan	100
<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</b>	78,3	80,07	103,06
	<b>Tingkat Swadaya Masyarakat</b>	31,75%	22,37%	70,45%
Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Tegalrejo	1. Pengelolaan Data Monografi Kelurahan / Kecamatan	10 buku	10 buku	100
	2. Penguatan Kelembagaan dan pembinaan adm RT RW	240 org	240 org	100
	3. Evaluasi Pembangunan Kelurahan	4 kel	4 kel	100
	4. Pengawasan Perizinan	12 bulan	12 bulan	100
	5. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 kali	12 kali	100

Pelayanan, Informasi, dan pengaduan masyarakat Kecamatan Tegalrejo	6. Pembinaan Anggota Linmas	4 Kel	4 Kel	100
	7. Operasi Panca Tertib	12 Bulan	12 Bulan	100
	8. Pemilihan RT, RW, LPMK	240 orang	240 orang	100
	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12 bulan	12 bulan	100
	2. Perekaman dan Pengambilan E-KTP	12 bulan	12 bulan	100
	3. Pemungutan Retribusi IMBB	2 izin IMB	2 Izin IMB	100
	4. Sosialisasi SPP	60 orang	60 orang	100
Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	Penguatan Paguyuban Lansia	200 orang	200 orang	100
	Peningkatan Kapasitas Pemerhati sungai	100 orang	100 orang	100
	PSN Jumantik Anak	100 orang	100 orang	100
	Sapaan Anak Kost	100 orang	100 orang	100
	Lintas Hijau	50 orang	50 orang	100
	Monev Bantuan Warga Miskin	12 bulan	12 bulan	100
	Gerbang Mas	450 orang	450 orang	100
	Administrasi PKK	1 Kec, 4 Kel.	1 Kec, 4 Kel	100
	Gelar Kesenian	300 orang	300 orang	100
	KKG, KB dan Kesehatan	200 orang	200 orang	100
	Gebyar PAUD	300 orang	300 orang	100
	Pawai Budaya	100 orang	100 orang	100
	PMPS	150 orang	150 orang	100
	Penguatan Kelembagaan FKPSM dan IPSM	50 orang	50 orang	100
	Gemar Makan Ikan	200 orang	200 orang	100
	Festival Olah Raga dan Permainan Anak Tradisional	350 orang	350 orang	100
	Pentas Seni Wilayah	750 orang	750 orang	100
Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Tegalrejo	Sosialisasi Bahaya Narkoba dengan Kesehatan Reproduksi	75 orang	75 orang	100
	Jumantik Remaja	24 orang	24 orang	100
	Pelatihan Kesenian Tradisional	65 orang	65 orang	100
	Pelatihan Kepemimpinan bagi remaja	25 orang	25 orang	100
	Penyuluhan Sistem Informasi Posyandu	75 orang	75 Orang	100
	Seminar Pembentukan Budaya dan Karakter Bangsa	50 orang	50 orang	100
	Sosialisasi Tanggap Bencana	75 orang	75 orang	100

	Penyuluhan HIV dan AIDS	50 orang	50 orang	100
	Pelatihan Pengelolaan Bank sampah	40 orang	40 orang	100
	Pelatihan pembuatan makanan tradisional	48 orang	48 orang	100
	Pelatihan Media Janur (lanjutan)	48 orang	48 orang	100
	Pelatihan Pangkas rambut (lanjutan)	48 orang	48 orang	100
	Pelatihan Usaha Syariah	30 orang	30 orang	100
	Kursus Meracik Kopi	20 orang	20 orang	100
	Pelatihan Hidroponik	20 orang	20 orang	100
	Pelatihan sablon (lanjutan)	25 orang	25 orang	100
	Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat	60 orang	60 orang	100
	Operasional JBM	12 RW	12 RW	100
	Administrasi PKK RW	12 PKK RW	12 PKK RW	100
	Administrasi PKK RT	47 PKK RT	47 PKK RT	100
	Kelurahan Siaga	50 orang	50 orang	100
	Penyusunan RPJMD Kelurahan Tegalrejo	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Kricak	Pelatihan kesehatan Lansia Segoro Werdho Mulyo	40 orang	40 orang	100
	Pelatihan Kader PKK, Kader Posyandu Balita dan Lansia	40 orang	40 orang	100
	Pelatihan saji menu sehat dan Lokakarya Kelompok GSI	40 orang	40 orang	100
	Pelatihan Tata Rias dan Busana untuk pentas	40 orang	40 orang	100
	Latihan Kesenian Tari Modern, Karawitan dan Jatilan	30 orang	30 orang	100
	Pelatihan MC Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia	30 orang	30 orang	100
	Pelatihan Baca tulis Aksara Jawa dan adat istiadat	30 orang	30 orang	100
	Sarasehan Kesenian Keroncong	40 orang	40 orang	100
	Penyuluhan dan Pembinaan manfaat hidup berkoperasi	75 orang	75 orang	100
	Workshop dan Diklat media bagi pendidik Anak PAUD	40 orang	40 orang	100
	Senam bersama pendidik dan peserta didik PAUD	150 orang	150 orang	100
	Seminar parenting pengasuhan anak usia dini (PAUD)	40 orang	40 orang	100
	Pelatihan tanggap bencana	40 orang	40 orang	100
	Pelatihan perawatan jenazah	25 orang	25 orang	100

	Pembinaan mainan tradisional	45 orang	45 orang	100
	Gebyar PAUD dan Lomba Kreatifitas Seni Anak Usia Dini	300 orang	300 orang	100
	Pelatihan Pembuatan Aneka Syrup dan inovasi produk jamu	50 orang	50 orang	100
	Pelatihan Pengelola Home Stay	50 orang	50 orang	100
	Pelatihan Tehnik pengawetan Non Kimia Produk makanan	45 orang	45 orang	100
	Pelatihan pembuatan, tehnik pengemasan dan pemasaran souvenir dari daur ulang	50 orang	50 orang	100
	Pelatihan Tehnik pembinaan kelompok sadar wisata	50 orang	50 orang	100
	Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat	60 orang	60 orang	100
	Adminsitrasi PKK RW	13 RW	13 RW	100
	Administrasi PKK RT	61 RT	61 RT	100
	Operasional JBM	13 RW	13 RW	100
	Operasional Kelurahan Siaga	50 orang	50 orang	100
	Penyusunan RPJMD Kelurahan	1 dokumenl	1 dokumen	100
Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Karangawaru	Sarasehan sehat bugar hari tua	60 orang	60 orang	100
	Seminar Kenakalan remaja, premanisme dan narkoba	40 orang	40 orang	100
	Workshop kampung Panca Tertib	30 orang	30 orang	100
	Sosialisasi Pembentukan RW Siaga	30 orang	30 orang	100
	Pelatihan Inisiasi Kampung Wisata	30 orang	30 orang	100
	Pelatihan pembuatan agropolitan	30 orang	30 orang	100
	Pelatihan budidaya burung kenari	30 orang	30 orang	100
	Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat	60 orang	60 orang	100
	Adminsitrasi PKK RW	14 RW	14 RW	100
	Administrasi PKK RT	56 RT	56 RT	100
	Operasional JBM	14 RW	14 RW	100
	Operasional Kelurahan Siaga	50 orang	50 orang	100
		Penyusunan RPJMD Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen

Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bener	Pelatihan IPSM Dasar	30 orang	30 orang	100
	Pelatihan Kesenian Angguk	30 orang	30 orang	100
	Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)	30 orang	30 orang	100
	Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia	30 orang	30 orang	100
	Pelatihan Administrasi Lembaga RT dan RW	30 orang	30 orang	100
	Pembinaan Kampung wisata	35 orang	35 orang	100
	Sosialisasi mainan anak tradisional	40 orang	40 orang	100
	Pelatihan daur ulang sampah anorganik	30 orang	30 orang	100
	Pelatihan ketrampilan membuat kue kering	30 orang	30 orang	100
	Pelatihan pembuatan telur asin	20 orang	20 orang	100
	Pelatihan Kreasi Hijab	25 orang	25 orang	100
	Pelatihan pembuatan hantaran nikah	25 orang	25 orang	100
	Pelatihan pemasaran produk secara online	20 orang	20 orang	100
	Pelatihan sayuran perkotaan	30 orang	30 orang	100
	Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat	60 orang	60 orang	100
	Adminsitration PKK RW	7 RW	7 RW	100

Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	Administrasi PKK RT	26 RT	26 RT	100
	Operasional JBM	7 RW	7RW	100
	Operasional Kelurahan Siaga	50 orang	50 orang	100
	Penyusunan RPJMD Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	100
	Bimbingan remaja terhadap kenakalan remaja	30 orang	30 orang	100
	1. Pemeliharaan Jalan Conblok	4 kelurahan	4 kelurahan	100
	2. Pemeliharaan SAH	2 kelurahan	2 kelurahan	100
	3. Pemeliharaan Fasilitas umum	3 kelurahan	3 kelurahan	100
	4. Pemeliharaan PJU	4 kelurahan	4 kelurahan	100
	5. Musrenbang Kecamatan & Kelurahan	5 dokumen	5 dokumen	100
	6. Pemeliharaan Makam TPU Utaralaya	12 bulan	12 bulan	100
	7. Buku Informasi Program Kegiatan	2 dok	2 dok	100
	8. Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	5 dok	5 dok	100
	9. Gelar produk UMKM	60 orang	60 orang	100
10. TKPK	2 laporan	2 laporan	100	
11. Pasar Rakyat	60 orang	60 orang	100	
12. Pembinaan dan penataan PKL	107 orang	107 orang	100	

## 2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya.



**Tabel III.7**  
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tujuan	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo					
Sasaran Strategis	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat					
	<b>Tahun 2017</b>			<b>Tahun 2018</b>		
<b>Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo	349	349	100	350	359	102,57

Capaian kinerja untuk tahun 2018 tercapai 102,57% melebihi target . Hal itu dapat dilihat pada tingkat perkembangan kelurahan pada tataran cepat berkembang baik pada tahun 2017 maupun pada tahun 2018.

Untuk memperdalam data terkait perbandingan capaian dan realisasi kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.8**  
Perbandingan capaian dan realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya.

No	Program/kegiatan	Indikator	Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	96%	100%	100%	97,11%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	87%	100%	100%	99,97%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	99%	100%	100%	100%
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mergangsan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	75	78,6	104,08%	78,3	80,7	103,06%
		Tingkat Swadaya Masyarakat	10%	31,74%	317,4%	31,75	22,37	70,45%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja program semuanya dapat tercapai dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Realisasi kinerja baik pada tahun 2017 maupun 2018 adalah sangat tinggi karena baik tahun 2017 dan 2018 capaian realisasinya di atas 91% dari target bahkan diatas 100%, kecuali untuk tingkat swadaya masyarakat. Akan tetapi dimbangi dengan swadaya masyarakat yaitu kerelaan warga untuk merelakan tanahnya untuk jalan permukiman di RW 07 Kelurahan Bener untuk keperluan jalan tembus dari Jalan Kyai Mojo tembus ke utara sampai dengan SMA Negeri 2 kurang lebih

swadaya Rp. 7.000.000.000 dan pembangunan cor bloknya melalui padat karya Tahun 2018.

### 3. Perbandingan target dan realisasi Indikator kinerja utama dengan target jangka menengah dalam Renstra

Apabila dibandingkan melalui kinerja unit pelayanan dan mutu pelayanan dengan tahun sebelumnya diperoleh data sebagai berikut:

Tabel III.9  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Renstra tahun 1	Target Renstra tahun 2	Target Akhir Renstra
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo	350	359	359	359	359

Selanjutnya capaian indikator kinerja program dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.10  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan Target Renstra

No	Program	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Target dalam Renstra tahun ke 2	Target Akhir Renstra	Prosentase capaian tahun ini terhadap target Renstra tahun 2	Prosentase capaian tahun ini terhadap target akhir Renstra
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	78,3	80,6	78,3	80	103,06	102%
		Tingkat Swadaya Masyarakat	31,75%	22,37%	31,75%	31,87%	70,45%	102,8%

#### **4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Kecamatan Tegalrejo pada tahun 2018 ini dapat dikatakan **BERHASIL** dalam mencapai target kinerja. Pernyataan tersebut dapat didukung dengan data capaian kinerja utama maupun indikator kinerja program yang sudah diuraikan pada bab yang sama.

Dukungan terhadap pernyataan keberhasilan juga dapat dilihat pada program kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tegalrejo untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Kecamatan Tegalrejo yang diuraikan pada Bab II laporan ini.

Indikator kinerja berupa “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo ” pada tahun 2018 ditargetkan 350 sedangkan dilihat dari hasil pengelolaan Tingkat perkembangan pembangunan kelurahan se Kecamatan Tegalrejo 359 atau dengan capaian 102,57%. Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Tegalrejo untuk tahun 2018 dapat mencapai angka sebagaimana yang ditargetkan. Hal itu didukung oleh beberapa faktor antara lain :

##### **1. Faktor internal SKPD**

###### **a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan**

Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

###### **b. Kerjasama antar unit**

Kerjasama antar unit atau seksi sangat diperlukan dalam rangka Penguatan integritas dan kerjasama. Pemberian motivasi kerja dalam hal kerjasama bagi para pegawai selalu dilakukan untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Kecamatan Tegalrejo dijadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi kerja bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.

###### **c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja seluruh PPTK harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Peran *Public Social Institutions* / Lembaga Sosial Masyarakat

Peran penting dari Lembaga Sosial Masyarakat yang berperan dalam pembangunan antara lain RT RW, LPMK, TP PKK, Paguyuban Kesenian, Paguyuban PAUD, Kelurahan Siaga, IPSM, Komisi Lansia dan BKM. Keterlibatan lembaga masyarakat tersebut dimulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya. Hal itu menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

### b. *Society Participation* / Partisipasi Masyarakat

Selain dari lembaga masyarakat, partisipasi juga ditunjukkan masyarakat secara pribadi artinya tidak mewakili lembaga atau institusi yang ada. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di kecamatan maupun kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan OPD Kecamatan Tegalrejo adalah sebagai berikut :

Tabel III.11  
Analisis Efisiensi

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	896.147.810,-	870.288.341,-	25.859.469,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	212.494.000,-	200.823.221,-	11.670.779,-
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.405.000,-	8.404.850,-	0,-
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	2.997.724.326,-	2.971.048.317,-	26.676.009,-
	1) Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban	345.727.120,-	343.709.620,-	2.017.500,-
	2) Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	170.321.148,-	166.541.388,-	3.779.760,-

3) Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	550.811.200,-	545.904.470,-	4.906.730,-
4) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	222.465.700,-	222.144.840,-	320.860,-
5) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak	323.192.900,-	322.282.620,-	910.280,-
6) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru	165.209.900,-	165.209.900,-	0
7) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Bener	177.736.900,-	175.516.900,-	2.220.000,-
8) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo	1.042.259.458,-	1.029.738.579,-	12.520.879,-

Berdasarkan data tersebut, analisis efisiensi dapat dijelaskan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan walaupun tidak seluruhnya merupakan efisiensi terutama pada sebagian kecil kegiatan tetapi tidak berpengaruh besar pada pencapaian tujuan organisasi.

Pada program administrasi perkantoran sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan dengan pertimbangan efisiensi dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Pengeluaran anggaran berdasarkan kebutuhan riil. Oleh karena itu sisa anggaran tidak dipergunakan oleh karena kebutuhan tercukupi. Contoh dari hal tersebut adalah kebutuhan pembayaran listrik, telpon dan air dikeluarkan sesuai dengan tagihan dan batas pagu yang ada dan masih terdapat sisa anggaran. Pada kegiatan yang lainnya antara lain pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan lain-lain juga seperti itu.

Selain itu pada anggaran penerimaan tamu tentu saja akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan tamu yang hadir (misalnya penerimaan studi banding) sehingga tidak seeta merta harus dilaksanakan oleh karena ada ketergantungan dengan pihak lain.

- b. Sub-sub anggaran pendukung pencapaian output ada beberapa yang tidak direalisasikan atau sebagian direalisasikan hanya sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian hal itu tidak mengganggu pencapaian target. Hal ini dapat

dilihat pada Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo.

## **6. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian perjanjian kinerja**

### **a. Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja**

Dilihat dari perjanjian kinerja pada tahun 2018, Kecamatan Tegalrejo memiliki satu program kerja yaitu Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Tegalrejo.

Sasaran strategis pada perjanjian kinerja adalah Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat dengan indikator kinerja sasaran adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo. Target kinerja pada tahun 2018 adalah 350 sedangkan berdasarkan pengukuran yang sudah dilakukan sesuai dengan formula tercapai target 359. Keberhasilan pencapaian target ini ditunjang oleh beberapa hal antara lain:

- 1) Keterkaitan antar kegiatan sehingga mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran. Hal itu dapat digambarkan dari kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Tegalrejo sebagai kegiatan yang menghasilkan data dukung terhadap pengukuran pencapaian target sasaran dengan kegiatan lain diantaranya adalah kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat pada empat kelurahan yaitu Kelurahan Kricak, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Bener.

Selain itu juga dukungan dari kegiatan lainnya pada tingkat Kecamatan Tegalrejo yaitu Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo, Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo serta Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo.

- 2) Dalam hal pelayanan masyarakat secara administratif melalui kegiatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan pada tahun 2018 Kecamatan Tegalrejo masuk nominasi dalam penilaian Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik antar kecamatan tingkat DIY. Hal ini akan memberikan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Tegalrejo sehingga berpengaruh baik terhadap partisipasi masyarakat yang juga terkait dengan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat.

3) Partisipasi dan Pelibatan warga masyarakat dalam perencanaan

Keterlibatan warga masyarakat dalam Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo diawali dengan berbagai usulan dalam musrenbang dari RT /RW kelurahan dan kecamatan. Kejelasan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan serta kejelasan perkiraan pagu anggaran yang dapat digunakan untuk merealisasikan usulan kegiatan dari masyarakat, serta kejelasan posisi atau peran Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Tegalrejo pada pencapaian target Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022, memberikan harapan besar dan kepastian pelaksanaan berbagai usulan dalam musrenbang sehingga partisipasi masyarakat semakin baik. Hal itu menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program kerja Kecamatan Tegalrejo.

b. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian perjanjian kinerja

Melihat analisis yang sudah diuraikan pada huruf a di atas, maka berbagai kegiatan tidak didapati menghambat pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Namun demikian catatan penting yang tidak boleh diabaikan adalah konsistensi sumber daya internal perangkat daerah atau boleh disebut integritas para pelaksana internal (pegawai) harus tetap dijaga dan ditingkatkan.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Kecamatan Tegalrejo Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel III.12  
Realisasi Anggaran

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase realisasi (%)
A.	Belanja Langsung	4.114.771.136,-	4.050.564.729,-	98,44
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	896.147.810,-	870.288.341,-	97,11
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	212.494.000,-	200.823.221,-	99,97
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.405.000,-	8.404.000,-	100
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis	2.997.724.326,-	2.971.048.317,-	99,11

	Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo			
	1) Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Tegalrejo	345.727.120,-	343.709.620,-	99,42
	2) Pelayanan, Informasi, dan pengaduan masyarakat Kecamatan Tegalrejo	170.321.148,-	166.541.388,-	97,78
	3) Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	550.811.200,-	545.904.470,-	99,11
	4) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Tegalrejo	222.465.700,-	222.144.840,-	99,86
	5) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Kricak	323.192.900,-	322.282.620,-	99,72
	6) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Karangwaru	165.209.900,-	165.209.900,-	100
	7) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bener	177.736.900,-	175.516.900,-	98,75
	8) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo	1.042.259.458,-	1.029.738.579,-	98,80
B.	Belanja tidak langsung	2.589.370.571,-	2.512.139.451,-	97,02

Realisasi anggaran berdasarkan tabel di atas yaitu untuk belanja langsung 98,44% dan untuk belanja tidak langsung 97,02% jika diambil nilai rata-rata menjadi 97,73%.



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari data capaian kinerja yang diuraikan dalam akuntabilitas kinerja pada Bab III dan uraian perencanaan kinerja pada Bab II, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target pada tahun 2018 Kecamatan Tegalrejo dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra). Baik pada indikator sasaran maupun pada indikator kinerja program keduanya menunjukkan pencapaian target yang sangat baik. Dengan kata lain Kecamatan Tegalrejo BERHASIL mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

### B. RENCANA TINDAK LANJUT

Ada beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kinerja, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Peningkatan peran unsur PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan petugas urusannya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan untuk mempercepat pencapaian target dan pelaporan.
2. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dan pemecahan persoalan bersama yang dapat menghambat kinerja SKPD
3. Pembinaan integritas sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tegalrejo, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2018 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

  
Camat Tegalrejo  
  
Drs. Raden Ryanto Tri Noegroho  
NIP.19620420 199303 1 004